

Hari, tanggal	Kamis, 15 September 2016		
Sumber Berita	http://berita.suaramerdeka.com/dpr-dorong-pemerintah-segera-bangun-pltn/	Hal/Kol.	-/-

DPR Dorong Pemerintah Segera Bangun PLTN
Kamis, 15 September 2016 04:31
Gading Persada



KUNKER: Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu (duduk kiri-red) didampingi Kepala BATAN Prof Dr Djarot Sulistyو Wisnu Broto berdiskusi dengan anggota DPR lain serta tamu undangan dalam kunjungan kerja ke di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN di Babarsari, Sleman, Rabu (14/9). (suaramerdeka.com/Gading Persada)

SLEMAN, suaramerdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendorong agar pemerintah untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Diharapkan PLTN pertama Indonesia sudah bisa mulai direalisasikan pada 2019 mendatang.

“Untuk nuklir (PLTN-red) harus dipercepat dan dibutuhkan langkah-langkah kongkret. Kalau perlu 2019 harus ada peletakan batu pertama pembangunan PLTN,” tegas salah satu anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi disela-sela kunjungan kerja (kunker) di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN di Babarsari, Sleman, Rabu (14/9).

Kurtubi mengaku geram dengan sikap pemerintah yang tidak menyegerakan pembangunan PLTN. Padahal semua infrastruktur baik itu sumber daya manusia (SDM) hingga aturan sangat mendukung.

Menurutnya jika Indonesia tidak segera membangun PLTN maka negara ini akan terus tertinggal dibanding dengan negara-negara lainnya, terutama negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam bahkan hingga negara yang tingkat pendapatan perkapitanya masih lebih rendah dibandingkan Indonesia yakni Bangladesh.

“Kalau ada regulasi yang menghambat industri nuklir akan kami ubah. Apalagi ada aturan yang menyebut bahwa PLTN merupakan opsi terakhir penyediaan energi jelas itu tidak benar. Nuklir harus diposisikan sebagai program negara. Kalau PLTN sudah berdiri maka investor pasti akan masuk ke Indonesia dan terbuka banyak lapangan pekerjaan,” jelas politisi dari Partai NasDem tersebut.

Kurtubi mengatakan, listrik adalah kunci untuk Indonesia menjadi negara maju dan tidak menjadi pengeksport tenaga kerja Indonesia yang kerjanya hanya menjadi babu. “Bagaimana akan membangun perusahaan yang besar yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar tanpa didukung adanya pasokan listrik yang melimpah,” katanya.

Dia pun mencontohkan NTB yang punya potensi besar sebagai penghasil jagung namun demikian tidak bisa membangun pabrik yang mampu mengolah hasil bumi di NTB dan menyerap tenaga kerja. “Komisi VII jelas sudah komitmen dengan pembangunan PLTN bahkan bila perlu ada peletakan batu pertama pembangunan PLTN,” bebarnya.

Dipimpin oleh Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu, sekitar searian para wakil rakyat yang khusus membidani energi itu melakukan kunker ke salah satu lokasi reaktor milik BATAN.

Kepala BATAN Prof Dr Djarot Sulistyio Wisnu Broto, mengatakan hasil survei nasional dengan 4.000 responden terhadap PLTN , maka penerimaan masyarakat akan adanya PLTN semakin tinggi. Jika 2014 masyarakat yang menerima PLTN mencapai 70 persen responden maka 2015 naik menjadi 75 persen.

Djarot mengaku SDM yang ada di Indonesia untuk membangun PLTN sudah mampu bahkan para ahli nuklir karena tidak terpakai di Indonesia bekerja di luar negeri yang punya PLTN. “Memang ada kendala masalah peraturan yang mengganjal dan sosialisasi yang masih kurang,” tandas dia